

Diplomasi K-Pop sebagai Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Indonesia

Aji Adira Fadia Putri Padmo

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
E-mail: adiraf@upnvj.ac.id

Achbil Khumaini Fajrin Muhammad

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
E-mail: achbilkfm@upnvj.ac.id

Adityamas Perdana Al-Hafidh

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
E-mail: adityamasperdana@upnvj.ac.id

Muhammad Aria Senna

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
E-mail: muhammadas@upnvj.ac.id

Abstract

South Korea implements a soft power strategy, namely cultural diplomacy through the Korean Wave in its diplomatic relations with Indonesia. This strategy has get responded positively to relations between the two countries because the Korean Wave is now one of the most popular cultures in Indonesia. This paper aims to identify and analyze the interest of K-Pop cultural diplomacy on the cooperation between South Korea and Indonesia. The Korean Wave is part of Korean cultural diplomacy in Indonesia and has a great influence on bilateral relations between the two countries. South Korea has a great opportunity for the interest of the Indonesian people to K-Pop music because it can be used as a means of increasing closer cooperation with Indonesia, especially in the economic and socio-cultural fields.

Korea Selatan menerapkan soft power strategy yaitu diplomasi budaya melalui Korean Wave dalam hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Strategi ini telah memberikan respon positif terhadap hubungan kedua negara karena Korean Wave kini menjadi salah satu budaya yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Paper ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepentingan diplomasi budaya K-Pop terhadap hubungan kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Korean Wave yang merupakan bagian dari diplomasi budaya Korea di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan bilateral kedua Negara. Korea Selatan mempunyai peluang yang besar atas

ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap musik K-Pop karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Keywords: Diplomasi Budaya, Korea Selatan, Indonesia, *Korean Wave*, *Soft Power*.

Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini telah menghasilkan banyak fenomena sosial yang dapat dirasakan individu, dan fenomena sosial tersebut kemudian menyebar melintasi batas negara, usia dan gender. Korea Selatan melalui Korean Pop atau yang dikenal sebagai K-Pop kini telah menjadi sebuah fenomena sosial dalam masyarakat dan menjadi perhatian di seluruh dunia. Korean pop merupakan salah satu produk budaya Korea yang paling populer dan popularitasnya telah menyebar ke berbagai negara. Saat ini perkembangan K-Pop terus mengalami kemajuan bukan hanya di kawasan Asia Timur, tetapi juga berkembang hingga Asia Tenggara bahkan telah merambah ke berbagai penjuru dunia¹. Salah satu Negara yang memiliki peminat terhadap K-Pop paling tinggi terutama di kalangan anak-anak dan remaja adalah Indonesia, sehingga tidak jarang fenomena sosial ini disebut sebagai demam K-Pop.

Kemunculan budaya K-Pop yang sangat mendominasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh diplomasi budaya yang diselenggarakan oleh Korea Selatan. Diplomasi budaya menjadi sebuah jembatan internasional suatu negara serta jaringan, kekutan dan interaksi yang dapat melewati batas-batas budaya dan nasional. Perkembangan teknologi telah menjadikan soft power dapat menyatu dengan budaya nasional termasuk moral, kepercayaan, pendidikan serta seluruh kemampuan yang terbentuk oleh masyarakat². Keberhasilan dalam melaksanakan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan telah memberikan banyak manfaat bukan hanya dampak positif dari segi ekonomi tetapi budaya K-Pop juga membuat hubungan antarnegara semakin meningkat seperti hubungan yang selama ini sudah terjalin antara Korea Selatan dan Indonesia.

Dari penjelasan terkait kasus diatas, penulis menemukan terdapat aspek atau unsur budaya yang digunakan dalam pelaksanaan sebuah diplomasi sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami peran aspek budaya tersebut dan pengaruhnya terhadap hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia maka penulis tertarik untuk menulis tentang Diplomasi K-Pop Sebagai Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Indonesia.

Diplomasi Budaya

Geoff Berridge dan Alan James memberikan pendapat mengenai diplomasi yang menyebutkan bahwa diplomasi merupakan suatu pengadaan hubungan yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia yang mana dalam penyelenggaraan ini dilakukan melalui diplomat yang bertujuan untuk membuat sebuah negosiasi dalam cakupan internasional³. Pengertian diplomasi dalam sudut pandang yang lebih konvensional yaitu suatu bentuk upaya dan usaha yang dilakukan sebuah negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang nasional dalam dunia yang lebih luas atau internasional. Sedangkan pengertian dari diplomasi budaya yaitu sebuah alat pertukaran baik informasi, seni, ide dan aspek budaya suatu negara terhadap negara lain guna menjaga sikap untuk saling mengerti antara negara yang satu dengan negara yang lain serta hubungan antar masyarakat didalamnya. Diplomasi budaya termasuk kedalam bentuk Soft Power sebagai alat kekuatan politik yang dijalankan oleh negara dan dipengaruhi oleh budaya, ide dan nilai⁴.

Soft Power

Dalam perspektif realisme, power atau kekuatan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer atau yang disebut dengan hard-power tetapi bisa juga dengan menggunakan soft power. Nye memberikan pendapat bahwa soft power yang dilakukan oleh suatu negara bersumber pada tiga hal, yaitu nilai politik yang dianut suatu negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kebudayaan yang akan membuat negara tersebut dianggap menarik oleh negara lain dan kebijakan luar negeri yang menjadikan suatu negara memiliki otoritas moral dan legitimasi⁵. Berkaitan dengan hal tersebut, terlihat bahwa konsep soft power cocok untuk menganalisa fenomena populer di Korea Selatan sebagai bagian dari diplomasi Korea Selatan dengan Indonesia untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya. Penerapan instrumen ini juga berarti bahwa pemerintah berperan dalam diplomasi K-Pop dan menempatkannya dalam ranah hukum sebagai bagian dari kebijakan luar negeri negaranya.

Presiden sebagai Pembuat Kebijakan

Presiden merupakan salah satu actor penting dalam menentukan arah Kebijakan Luar Negeri suatu Negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadiannya dalam merumuskan Kebijakan Luar Negeri, seperti pandangan politik, keyakinan, dan human nature nya. Karakter seorang presiden membantunya dalam menentukan orientasi kehidupannya, tidak hanya dalam waktu tertentu, namun selamanya. Pengalaman hidup seorang individu lah yang dapat membentuk suatu karakter, sehingga setiap presiden

memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter seseorang adalah bagaimana cara dia menghadapi lingkungannya, mempertahankan nilai-nilai yang dipercayai sebagai acuan dasar perilakunya. Pengelompokan terhadap karakter pemimpin dapat dibedakan menjadi empat pola.

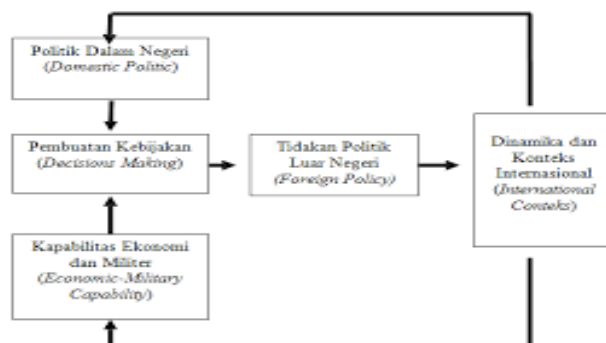
Karakter aktif-positif memiliki gabungan antar kepribadian yang konsisten, dia memiliki harga diri yang tinggi, berkarisma, fleksibel dan mudah beradaptasi, serta cenderung mudah menghargai orang lain. Individu yang memiliki karakter aktif-positif akan menyebarkan nilai-nilai dan pemikiran yang dipercayainya, dia juga sangat terbuka pada pengalaman dan ide-ide baru serta belajar dari kesalahan. Menurut David Barber, jenis kepribadian ini akan memaksimalkan energi dan potensi mereka untuk pertumbuhan negara. Pemimpin yang mempunyai karakter aktif-negatif merupakan individu yang kuat secara individu dan emosional. Mereka cenderung impulsif dalam melihat suatu permasalahan. Namun di sisi lain karakter ini sangat ambisius, agresif. Representatif kebijakan yang dihasilkan cenderung buruk, walaupun pengambilan kebijakan di masa lalunya baik.

Pemimpin yang memiliki karakter pasif-positif merupakan individu yang cenderung meminimalisir keterlibatannya dalam perumusan pembuatan kebijakan dan lebih suka mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Tujuan hidupnya adalah untuk mencari imbalan dari apa yang telah dilakukannya. Pemimpin dengan karakter seperti ini cenderung kurang optimis dan sangat bertumpu pada orang lain. Kebijakan tidak terlalu responsif/aktif namun setiap kebijakan menghasilkan kebijaksanaan. Dan pemimpin yang memiliki karakter pasif-negatif merupakan individu yang cenderung hanya mengikuti protokol dan memiliki selfestem yang rendah. Mereka menerima peran sebagai kepala negara hanya karena mereka berfikir sudah seharusnya mereka menjadi pemimpin. Karakter ini juga menggambarkan kurangnya pengalaman politik dan fleksibilitas dalam melakukan kepemimpinan. Mereka cenderung menarik diri dari konflik atau isu yang ada. Tidak memiliki nilai dan prinsip yang jelas. Hanya menekankan kebijakan sipil mereka sendiri, yang berarti erat hubungannya dengan ke otoritarian dalam pengambilan kebijakannya⁶.

Decision Making Theory

Dalam teori kebijakan politik luar negeri dan teori pengambilan keputusan terdapat tiga unsur yang menjadi faktor paling determinan yaitu sebagai berikut⁷: Pertama, Kondisi politik dalam negeri yaitu sebuah kemampuan yang dilakukan dalam hubungan politik dengan negara-negara luar negeri. Kemampuan ini tidak hanya akan menimbulkan suatu keterbukaan baik sistem politik maupun stabilitas negara tetapi juga akan membentuk aspek politik luar negeri lainnya yaitu aspek budaya yang nantinya aspek budaya ini

akan mempengaruhi dan menjadi faktor dalam membentuk tingkah laku manusia serta kepribadian manusia dalam pengambilan keputusan. Kedua, Kondisi ekonomi dan militer domestik yaitu suatu usaha atau kemampuan yang dilakukan negara dalam rangka menghasilkan kemampuan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menopang politik luar negerinya termasuk juga faktor geografis yang menjadi faktor mendasar dalam mempertimbangkan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, Konteks atau cakupan internasional. Terdapat tiga unsur yang sangat penting dalam berbicara mengenai pengaruh konteks internasional terhadap politik luar negeri yang dijalankan suatu negara antara lain yaitu: politis, ekonomis dan geografis. Lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan internasional suatu negara terdiri dari lokasi yang dimilikinya yang berkaitan dengan negara-negara lain serta hubungan ekonomi dan politik yang terbentuk dengan negara lain.



Gambar 1.1 Skema Perumusan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin

Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terkait Korean Wave

Dalam implementasi politik luar negeri yang diselenggarakan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang sangat signifikan. Perubahan ini terjadi karena adanya kepentingan nasional dalam negeri yang berbeda-beda pada setiap pemerintahan yang dijalankan di Korea Selatan. Politik luar negeri di Korea Selatan dapat dilihat dari dua periode yaitu pertama, periode dimana politik luar negeri dijalankan pada masa pemerintahan otoriter (1948-1987) dan periode dimana politik luar negeri dijalankan pada masa pemerintahan sipil (1992-sekarang)⁸.

Di masa awal pemerintahan otoriter Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan masih berfokus pada usaha meningkatkan stabilitas fungsi dan sistem pemerintahan akibat adanya ancaman invasi yang dilakukan oleh Korea Utara dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Lalu pada tahun 1961, Korea Selatan mulai berfokus untuk menjaga kebudayaan Korea Selatan yang bertujuan untuk menangkis pengaruh dari luar dengan membentuk kebijakan mengenai

kebudayaan seperti membuat UU (Undang-Undang) yang berkaitan dengan kebudayaan Korea Selatan.

Walaupun kebijakan tersebut belum menjadi prioritas utama. Pada tahun 1992 pemerintahan Korea Selatan mulai dipimpin oleh presiden yang memiliki latar belakang sebagai warga sipil dimana pada masa pemerintahan ini mulai berfokus pada mengembangkan kebudayaan Korea Selatan termasuk K-Pop. Kebijakan yang dibuat ini berbeda setiap era Presidennya. Berikut adalah perbandingan kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Roh Moo Hyun dan Lee Myung Bak.

Kebijakan Roh Moo Hyun

Di bawah pemerintahan Presiden Roh Moo Hyun, kebijakan luar negeri yang dilakukan adalah memprioritaskan pengembangan identitas nasional Korea Selatan pada level internasional, dengan cara secara konsisten meningkatkan daya saing industri budaya, dengan melakukan reorganisasi terhadap Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Presiden Roh Moo-hyun ke Indonesia yang bertujuan untuk mempererat kerja sama (Joint Declaration on Strategic Partnership). Pembentukan Kemitraan Strategis tersebut melibatkan kerjasama di beberapa sektor seperti di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Masyarakat juga berperan sangat dominan dengan kebijakan Han Style atau Han Brand untuk melakukan perubahan budaya Korea yang bersifat tradisional menjadi budaya yang bersifat global, melalui pilar hangeul, hanshik, hanbok, hanji, dan hangeuk.

Pada tahun 2011, Dalam “Republic of Korea Diplomatic White Paper” menegaskan bahwa Diplomasi Budaya telah dilakukan Pemerintah Korea Selatan sebagai pelaksanaan salah satu pilar dalam berdiplomasi. Hal tersebut didasarkan karena meningkatnya peran soft power dan budaya sebagai faktor penting daya saing antarbangsa dan juga menjadi sumber daya ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Korea Selatan menganggap bahwa dengan menggunakan soft power dianggap lebih baik dibandingkan dengan menggunakan hard power, Korea Selatan yang termasuk ke dalam negara middle power yang tidak dapat menjadi penyeimbang kekuatan antara China dan Jepang. Peningkatan perekonomian Korea dan meluasnya budaya Korea melalui Korean Wave, menjadi salah satu aspek yang mendorong meningkatnya soft power yang dilakukan oleh Korea Selatan.

Kebijakan Lee Myung Bak

Korea Selatan dibawah kepemimpinan Lee Myung Bak memberlakukan kebijakan “value diplomacy” dan “complex diplomacy” menjadi kebijakan

utama dalam rangka peningkatan citra negara Korea Selatan dalam dunia internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan diplomasi dan budaya Korea Selatan serta meningkatkan branding nasional Korea Selatan secara bersamaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Korea Selatan dibawah Presiden Lee melakukan upaya dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna menunjukkan dalam kemampuan diplomatiknya untuk menunjukkan potensi yang dimiliki Korea Selatan baik secara nasional maupun internasional. Pemerintah Korea Selatan telah menggunakan soft power untuk dapat meningkatkan dan membangun kemampuannya menjadi aktor dalam dunia internasional.

Dengan menjadikan Korea sebagai aktor internasional yang berwawasan luas dengan secara aktif ikut terlibat dalam kegiatan internasional guna menciptakan perdamaian dunia merupakan cita-cita dari citra global. Korea merubah kebiasaan sempitnya dalam berdiplomasi, dapat terlihat dari fokus yang ditujukan pada penyelesaian konflik Semenanjung Korea yang juga merupakan acuan dari pencitraan global Korea dengan menjadikan Korea Selatan sebagai sebuah bangsa yang berbudaya modern dimana perkembangan dan kemajuan teknologi industri yang semakin canggih, kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kualitas pendidikan yang baik serta potensi budaya yang dikemas secara menarik juga menjadi salah satu faktor pendukung⁹.

Baik Presiden Lee Myung Bak ataupun Presiden Roh Moo Hyun, keduanya merupakan sosok pemimpin yang memiliki karakter aktif-positif. Hal ini karena mereka tidak ragu untuk membuat kebijakan yang lebih baik dengan bercermin dari pengalaman sebelumnya. Mereka juga sangat menyadari kekurangan dan kelebihan dari negaranya masing-masing, sehingga setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sangatlah rasional dan tepat sasaran. Dengan pemahaman tentang kekurangan dan kelebihan negaranya tersebut, mereka dapat memaksimalkan kelebihan negaranya guna menutupi kekurangan. Seperti yang dikatakan David Barber, sebagai pemimpin yang berkarakter aktif-positif mereka memaksimalkan energi dan potensinya untuk pertumbuhan negara.

K-Pop Sebagai Alat Diplomasi Korea Selatan

Tujuan dari banyaknya idola Korea Selatan baik yang berbentuk Girlband, Boyband, maupun Soloist melainkan Korea Selatan ingin budayanya dikenal dan diakui dunia internasional. Joseph Nye dalam karyanya yang berjudul *"Public Diplomacy and Soft-Power"* menyebutkan bahwa soft power merupakan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik daripada melalui sebuah paksaan¹⁰. Oleh karena itu, Korea Selatan telah menggunakan K-Pop sebagai alat untuk mengimplementasikan soft power guna

memberikan manfaat berupa peningkatan ekonomi dan juga membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan citra Korea Selatan dimata dunia. K-Pop bukan hanya menjadi ciri khas dalam musik Korea Selatan tetapi juga menjadi ciri khas nasional, yang dapat membangkitkan kepercayaan dan minat terhadap masyarakat internasional. Dalam perkembangannya citra global Korea Selatan dapat menggeser citra negatif Korea Selatan di masa lalu karena ketidakstabilan politik, perpecahan, kemiskinan, dan sekarang menjadi negara yang lebih demokratis dan modern serta aktif dalam berbagai kegiatan dan hubungan internasional¹¹.

Jika dikaitkan pengambilan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam hubungan diplomatik dengan Indonesia bahwa kondisi internal dari situasi ekonomi domestic ini paling menonjol karena rancangan yang terdapat dalam Korean Wave bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Korea Selatan pasca krisis. Korean Wave pada dasarnya dicanangkan sebagai alat soft power untuk mempengaruhi perhatian dunia agar negara-negara diberbagai dunia melirik produk yang dihasilkan oleh Korea Selatan semenjak Korea Selatan mengalami krisis perekonomian pada tahun 1998.

Seiring perkembangannya, Korean Wave telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Korea Selatan sehingga pemerintah mulai menjadikan Korean Wave sebagai alat senjata Korea Selatan terhadap negara-negara luar dengan tujuan agar ekspor budaya dan pariwisata Korea Selatan akan mengalami kenaikan permintaan yang tinggi¹². Tingginya ketertarikan budaya Asia Timur melalui budaya populer global telah mempengaruhi masyarakat dunia terhadap budaya Korea Selatan terutama daya tarik terhadap musik K-Pop dalam pasar Indonesia.

Dari pembahasan mengenai soft power dan diplomasi yang telah dilakukan oleh Korea Selatan penulis yakin bahwa daya tarik terhadap musik K-Pop di Indonesia akan berakibat juga pada tingginya minat wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke Korea Selatan khususnya bagi para penggemar K-Pop. Menurut data statistik Organisasi Pariwisata Korea (KTO), 17.241.823 turis luar negeri mengunjungi Korea Selatan, dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah wisatawan meningkat 30,3%, dan total Foreign Tourist yaitu berjumlah 13.231.651. Indonesia menjadi negara dengan penyumbang terbanyak wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya yaitu sebesar 52%.

Sama seperti yang diutarakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, kondisi internasional merupakan kondisi saling ketergantungan satu sama lain dimana semua aktor akan memainkan perannya masing-masing dan saling terkait sehingga menimbulkan kondisi politik global yang ketergantungan. Sifat saling ketergantungan ini akan menghasilkan sebuah hubungan timbal balik antar negara tersebut. Dalam kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan,

terlihat bahwa Korea Selatan memiliki kepentingan terhadap Indonesia terutama dalam bidang ekonomi dan penyebaran budaya.

Peluang pasar industri musik K-Pop, Indonesia banyak membawa keuntungan bagi Korea, terutama dari segi ekonomi. Namun disisi lain Indonesia juga mendapatkan keuntungan dalam hal perdagangan. Semakin banyak penggemar K-Pop yang membeli tiket konser, *merchandise* atau produk dari Korea Selatan, investasi Korea Selatan di Indonesia akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, tidak hanya Korea Selatan yang diuntungkan dengan K-Pop tapi Indonesia juga mendapat timbal balik¹³. Dengan demikian, dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, kedua belah pihak tetap bisa mendapatkan keuntungan yang sama.

Faktor selanjutnya adalah situasi politik domestik, di mana semenjak bergantinya pemerintahan Korea Selatan yang mulai digantikan dari presiden yang berlatar belakang otoriter menjadi presiden yang berlatar belakang warga sipil. Hal inilah yang mendorong arah politik luar negeri Korea Selatan yang mana pada masa ini perkembangan budaya di Korea Selatan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan maju. Pemerintahan sipil Korea Selatan pertama dipimpin oleh Kim Young Sam.

Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu politik luar negeri dengan Korea Utara dalam kebijakan unifikasi. Selain itu juga terdapat kebijakan lain yaitu Segyehwa yang ditetapkan pada 17 November 1994. Kebijakan ini merupakan reaksi terhadap globalisasi khususnya di bidang ekonomi yang bertujuan untuk menjadikan Korea sebagai negara yang maju¹⁴. Aspek budaya menjadi salah satu aspek reformasi yang dicapai melalui "*Creativity of the New Korea*" Tujuannya guna melestarikan budaya yang dimiliki Korea Selatan, yaitu menjadikan budaya Korea Selatan menjadi budaya yang dapat menarik perhatian berbagai negara di dunia dan tidak meniru budaya yang datang dari luar. Sejak Presiden Kim Dae-jung menjabat (1998-2002), pemerintah Korea telah mendorong perkembangan industri budaya Korea dan menyatakan dirinya sebagai "*Culture President*".

Faktor yang terakhir adalah dilihat dari konteks internasional di mana masyarakat internasional masih menganggap Korea Selatan identik dengan kemiskinan, ketidakstabilan politik, pembagian wilayah, dan zona demiliterisasi sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Korea Selatan pada saat itu yaitu Lee Myung-Bak dalam Szondi tahun 2008. Oleh karena itu Korea Selatan mulai berpartisipasi secara aktif untuk membangun sebuah *national branding*. Korea Selatan percaya bahwa mereka pantas mendapatkan respect dan apresiasi dari dunia. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah branding dalam Korean Wave untuk dapat merefleksikan suatu negara yang disebut dengan soft power dibandingkan dengan sarana militer yang digunakan dalam lingkup dunia internasional.

Apabila suatu negara berhasil meningkatkan branding nasionalnya maka negara tersebut akan mendapat respect dan apresiasi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Perkembangan K-Pop yang berlangsung sangat pesat di Indonesia dan diikuti dengan terbentuknya kesan atau persepsi positif masyarakat Indonesia terhadap Korea menciptakan hubungan antar kedua negara menjadi kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan kinerja di berbagai sektor seperti sosial budaya, politik dan ekonomi. Apabila kerjasama atau hubungan dalam bidang politik dapat terjalin dengan harmonis dan baik maka akan kerjasama dalam bidang lain lebih mudah untuk dicapai. Peningkatan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan juga dapat dilihat dengan baik melalui kerjasama perdagangan antara kedua negara. Selain itu, dampak di bidang ekonomi juga didukung oleh sektor pariwisata Korea Selatan yang tentunya berhubungan dari dampak signifikan dalam pengimplementasian soft-power ini.

Kesimpulan

Sebagai alat diplomasi Korea Selatan, musik pop Korea tentunya dapat membawa manfaat dan memenuhi kepentingan nasional Korea Selatan. Faktor ini dipengaruhi karena K-Pop digunakan sebagai alat diplomasi dalam rangka menyebarkan pengaruh Korea Selatan ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia khususnya dalam bidang kebudayaan yang telah menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi Korea Selatan.

Menurut William D. Coplin, kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan tersebut dapat dianalisa melalui *Decision Making Theory* di mana terdapat tiga faktor determinan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan yaitu (1) Kondisi Politik Domestik, (2) Kondisi Ekonomi dan Militer, dan (3) Konteks Internasional. Jika dikaitkan dengan kebijakan soft power yang digunakan pemerintah Korea Selatan memainkan peran penting dalam meningkatkan citra Korea Selatan.

Di Indonesia, pesatnya perkembangan K-Pop yang diikuti dengan terbentuknya kesan atau persepsi positif masyarakat Indonesia terhadap Korea. Dengan persepsi positif yang dibentuk oleh Korea Selatan di Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara, yang dapat mendukung peningkatan kerjasama diberbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan signifikan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan juga dilihat dari pesatnya perkembangan perdagangan bilateral kedua negara.

Industri pariwisata Korea Selatan juga menjadi salah satu penopang ekonomi Korea Selatan, yang tentunya tidak lepas dari dampak signifikan penerapan soft power tersebut. Hal tersebut juga dapat dianalisa dalam small theory dimana Presiden yang berperan dalam melakukan kebijakan luar negeri untuk menyebarkan kebudayaan Korea Selatan dengan sangat proaktif ini

merupakan sosok pemimpin yang memiliki karakter aktif-positif. Seperti yang dikatakan David Barber, sebagai pemimpin yang berkarakter aktif-positif mereka memaksimalkan energi dan potensinya untuk pertumbuhan negara.

Endnotes

¹ S. A. Nyarimun, *Musik K-Pop Sebagai Alat Diplomasi Dalam Soft-Power Korea Selatan*, Universitas Satya Negara Indonesia, 2017. Skripsi. Tidak diterbitkan, 76-77

² K. H. Jung, "Cultural Diplomacy as the Means of Soft-Power in an Information Age", *Jurnal Internasional*, Vol. 1 Nomor 4, 2011.

³ Berridge dan James, 2012: 69

⁴ Leonardo, *Diplomasi Budaya Korea Selatan Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan-Indonesia*. Tp . 2019, 11-12

⁵ J. S. Nye, *Soft-Power: The Means to Success In World Politics*, (United States: Public Affairs, 2004).

⁶ Ainun Arta Zubaidah, *Conciliator Vs Bloc Leader : Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump Dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi Cina*, 2019. Skripsi tidak diterbitkan. 11-16

⁷ W. D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 30.

⁸ L. E. Puimara, *Kebijakan Korea Selatan Terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea*. Universitas Indonesia, Skripsi. Tidak diterbitkan, 2018, 19-31.

⁹ L. M. Bak, *The Lee Myung-Bak Administration's Foreign Policy and National Security Vision: Global Korea The National Strategy of the Republic of Korea*. (Cheong Wa Dae: Office of The President, 2009).

¹⁰ J. J. Nye, "Public Diplomacy and Soft-Power", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 61 No. 6, 2008, 94.

¹¹ Y. Kim, *Globalization of Korean Media. Hallyu: Influence of Korean Populer Culture in Asia and Beyond*.(tp, 2011), 37

¹² T. Economist, *South Korea's Pop Culture Exports*, <https://www.economist.com/asia/2010/01/25/hallyu-yeah> diakses 25 Januari 2021.

¹³ S. Luthviana, *Kepentingan Diplomasi K-Pop Korea Selatan Terhadap Indonesia Dalam Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Tahun 2015-2018*. Skripsi. 2019.

¹⁴ A. A. Aziz, "Hallyu sebagai Sarana Peningkatan Daya Tarik Republik Korea". *Korean Studies Serie-A*. 2021, 12.

References

Aziz, A. A. (2012). *Hallyu sebagai Sarana Peningkatan Daya Tarik Republik Korea*. *Korean Studies Serie-A*. 12.

- Bak, L. M. (2009). The Lee Myung-Bak Administration's Foreign Policy and National Security Vision: Global Korea the National Strategy of the Republic of Korea. Cheong Wa Dae: Office of The President.
- Coplin, W. D. (1992). Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis CV, hal, 30. Bandung: Sinar Baru.
- Economist, T. (2010, januari 25). South Korea's Pop Culture Exports, <https://www.economist.com/asia/2010/01/25/hallyu-yeah>.
- Jung, K. H. (2011). Cultural Diplomacy as the Means of Soft-Power in an Information Age, Jurnal Internasional. 1-4.
- Kim, Y. (2011). Globalization of Korean Media. Hallyu: Influence of Korean Populer Culture in Asia and Beyond. Do Kyun Kim dan Min-Sun Kim (eds). . 37.
- Leonardo. (2019). Diplomasi Budaya Korea Selatan Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan-Indonesia, 11-12.
- Luthviana, S. (2019). Kepentingan Diplomasi K-Pop Korea Selatan Terhadap Indonesia Dalam Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Tahun 2015-2018.
- Nyarimun, S. A. (2017). Musik K-Pop Sebagai Alat Diplomasi Dalam Soft-Power Korea Selatan, Universitas Satya Negara Indonesia. 76-77.
- Nye, J. S. (2004). Soft-Power: The Means to Success In World Politics. . Public Affairs: United States.
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft-power, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, hal 94.
- Paik, J. G. (n.d.). Korean Wave as Tool for Korea's New Cultural Diplomacy. http://file.scirp.org/pdf/AASoci20120300004_59668127.pdf.
- Puimara, L. E. (2018). Kebijakan Korea Selatan Terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea (Skripsi S1, Universitas Indonesia, 2018). 19-31.
- Suryani, E. (2014). Ni Putu Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power Untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan, Universitas Indonesia. 79.
- Zubaidah, Ainun Arta. 2019. "Dissertations and Thesis." Conciliator vs Bloc Leader: Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi Cina 11-16.